“Tak Cukup Bagi Kami Meratap, Kami Harus Berjuang” Kemandirian Mama-Mama dalam Dinamika Pemekaran di Tanah Papua

I Ngurah Suryawan

Jurusan Antropologi, Fakultas Sastra,
Universitas Papua (UNIPA) Manokwari
ngurahsuryawan@gmail.com

Abstract

This article is ethnography of Papuan mothers working at traditional market. It discusses Papuan women's response, in particular Papuan mothers who engaged in trading at traditional market, in the context of desentraliation and social and cultural transformation in Papua. The mama-mama (mother's) attempt to build independency and social solidarity in their effort to meet household daily needs and manage the household. They organized themselves in SOLPAP (solidarity of the native Papuan trader) and KOMMPAP (Native Papuan Mothers Trader Cooperation) and this become their social movement in which they exercise their independency and solidarity. Through these organisations, they attempt to access the economic resources and strengthen their network. This article suggests that the mother's social movement illustrates the independency or Papuan mothers in the context of social and cultural transformation which has become complex in the decentralization.

Keywords: *Papuan women. Idenpendency, ethnography, socio-cultural transformation, social movement*

Abstrak

Artikel ini adalah etnografi perjuangan mama-mama Papua yang berdagang di beberapa pasar tradisional. Artikel ini mendiskusikan tanggapan perempuan Papua, terutama mama-mama Papua dalam menghadapi dinamika pemekaran daerah dan transformasi sosial budaya di Tanah Papua. Perjuangan mama-mama Papua untuk menumbuhkan kemandirian dan solidaritas sosial tergambar jelas di masa pemekaran dan transformasi. dalam pemenuhan ekonomi rumah tangga. Perempuan Papua ini berjuang dalam keseharian kehidupan mereka dan berperan penting dalam menjalankan hal-hal pokok dalam kehidupan rumah tangga. Gerakan sosial mama-mama Papua untuk mengakses pasar tradisional yaitu SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) dan Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (KOMMPAP) menjadi praksis mereka untuk mengorganisir diri, berlatih kemandirian untuk berjuang merebut akses ekonomi dan sekaligus memperkuat solidaritas sosial para mama Papua. Artikel ini juga mendiskusikan bagaimana gerakan sosial mama-mama Papua ini adalah sebuah inspirasi dari langkah menumbuhkan kemandirian perempuan Papua di tengah transformasi sosial budaya yang semakin pelik di Papua karena pemekaran daerah.

Kata kunci: *perempuan Papua, kemandirian, etnografi, transformasi sosial budaya, gerakan sosial*

Pendahuluan

Suatu hari di bulan Maret 2014 saya berkesempatan mengunjungi Pasar Gelael Jayapura. Lantai pertama pasar ini berupa swalayan dan di lantai atas berdiri megah sebuah restoran cepat saji, KFC. Sejak sore hingga malam saya memperhatikan aktivitas

mama- mama Papua yang sibuk berjualan. Saat sore hari mereka mulai berdatangan entah darimana asala mereka, dan mulai memenuhi halaman di depan pasar swalayan Gelael. Mereka membawa barang dagangan dalam karung berupa sayur-sayuran, sirih pinang, buah- buahan, patatas, ubi dan sebagainya yang mereka gendong. Setibanya di depan pasar,

para mama mulai menggelar dagangannya beralaskan tikar dan alas seadanya. Dagangan diatur sedemikian rupa berupa tumpukan-tumpukan kecil. Sementara itu, tampak orang-orang berbaju seragam pegawai negeri keluar masuk Supermarket Gelael dan KFC untuk berbelanja. Mereka terlihat berlama-lama berbelanja di dalam supermarket. Ada beberapa dari mereka yang sedang bercengkrama di KFC.

“Sa setiap hari dengar di radio, atau dengar biasa pejabat dong pidato di depan kitorang bahwa sekarang itu su` ada Otsus, yang katanya bisa angkat torang orang Papua pu` derajat, tapi sampai hari ini torang tetap begini, baru kapan torang ini bisa seperti orang Cina dorang, Makate (Makassar), atau orang Jawa dorang, padahal ini kita pu` tanah, pemerintah harus bisa jawab ini semua. Kami su bosan dapat tipu terus!”¹

Di Kota Jayapura, perjuangan SOLPAP (Solidaritas untuk Mama – Mama Pedagang Asli Papua) mulai bergulir sejak 2008. Organisasi ini berupaya menuntut pembangunan pasar bagi para perempuan asli. Serangkaian pertemuan telah dilakukan dengan Pemkot, DPRD dan DPRD. Saat itu bahkan sampai harus dialokasikan dana mencapai Rp 1 Milyar lebih untuk pembentukan Panitia Khusus (Pansus). Pansus tersebut kemudian dibagi lagi menjadi 3 Kelompok Kerja (Pokja), yakni Pokja Desain dan Konstruksi, Pokja Lokasi, dan Pokja Dana atau pembiayaan. Namun, dalam pertemuan dengan Pemkot 10 Oktober 2008, Pemkot mengaku tidak memiliki dana untuk itu dan menegaskan itu menjadi tanggung jawab Pemprov. Pada 14 Oktober 2008 SOLPAP mencoba mengirim proposal ke Pemprov tetapi tidak mendapat tanggapan. Setelah menanti sekian lama, akhirnya 14 September 2009 barulah mama – mama pedagang asli Papua bisa bertemu dengan Gubernur.

Ratusan mama-mama Papua men- datang gedung Dewan pada 30 Maret 2010. Guyuran

gerimis tidak menciutkan semangat mereka untuk meneriakkan yel-yel. Mereka berjalan dari Pasar Pharaa menuju gedung Dewan yang berjarak sekitar 3 Km. Meski sempat dihadang oleh Satpol PP di pagar masuk Kantor Bupati gunung Merah Sentani namun rombongan mama-mama Papua yang dikoordinir oleh Ibu Betty Warweri ini berhasil masuk ke dalam gedung DPRD Sentani. Mama-mama ini juga membawa beberapa spanduk dan pamflet yang rata-rata bertuliskan aspirasi mereka. Beberapa tulisan dalam pamphlet tersebut antara lain: “Hapuskan sistem monopoli dagang komoditas asli Papua”, “Hentikan praktek pendatangan orang non Papua menguasai meja-meja dan los-los di pasar baru Pharaa Sentani”, “Dagangan lokal khusus untuk pedagang asli Papua”².

Pasar di Papua adalah sebuah ruang sosial. Di dalamnya adalah cermin dari masyarakat setempat dengan beragam persoalan. Salah satu yang paling menonjol adalah persoalan akses ekonomi, yang tercermin dalam perjuangan mama-mama Papua. Jika ditelisik lebih dalam pasar juga dapat menguraikan kompleksitas persoalan kesehatan, pendidikan, politik lokal, hingga kekerasan dalam rumah tangga. Kompleksitas persoalan itulah yang tengah terjadi di Tanah Papua. Beragam persoalan muncul silih berganti, yang jika ditelisik lebih mendalam akan menggambarkan sebuah gambaran persoalan yang menunjukkan saling keterkaitan. Satu keputusan akan membawa implikasi yang kompleks pada berbagai persoalan. Tulisan ini akan menelusuri pasar tradisional di Papua, khususnya di Pasar Sanggeng dan Wosi di Kota Manokwari, Papua Barat untuk mengamati lebih dalam upaya mama-mama Papua merebut akses berjualan di pasar tersebut.

¹ Lihat “Untuk Mama Papua, Bukan Pasar Biasa dalam <http://papuawoman.blogspot.com/2010/04/untuk-mama-papua-bukan-pasar-biasa.html>. (Diakses 20 Oktober 2010).

²Lihat “Mama-mama Papua demo ke DPRD” dalam <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Mama-mama+Papua+Demo+ke+DPRD&dn=20100330221832>. Diakses 22 Oktober 2010.

Pasar awal mama-mama Papua di depan Gelael Kota Jayapura (foto: Dokumentasi SOLPAP).

Bagian awal artikel ini mengelaborasi persoalan pemekaran daerah dan politik ruang yang memecah Papua sebagai konteks awal. Di tengah konteks itulah—dalam politik ruang pemekaran daerah—terdapat kisah-kisah etnografi perjuangan mama-mama Papua di pasar-pasar tradisional, yang berjuang dalam upaya pemenuhan ekonomi rumah tangga mereka ditengah himpitan tugas lain mereka yaitu bekerja di kebun dan mengurus anak-anak. Perempuan Papua berjuang dalam keseharian kehidupan mereka dan berperan penting dalam menjalankan hal-hal pokok dalam kehidupan rumah tangga.

Gerakan sosial perempuan Papua untuk mengakses pasar tradisional yaitu SOLPAP dan Koperasi Mama-Mama Pedagang Asli Papua (KOMMPAP) menjadi praksis usaha mereka untuk merebut akses ekonomi dan sekaligus memperkuat perekonomian rumah tangga orang Papua. Bagian terakhir dari artikel ini mencoba mendiskusikan bagaimana menempatkan gerakan social mama-mama Papua ini dalam menumbuhkan kemandirian di tengah transformasi sosial budaya yang terjadi di Papua.

Politik Ruang dan Pemekaran Daerah

Sejarah Pemekaran dan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dimulai dengan turunnya dua Undang-Undang yang sama sekali tidak berjalan yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 45 tahun 1999 tentang pemekaran provinsi Papua menjadi tiga provinsi yaitu Provinsi Papua,

Papua Tengah dan Papua Barat dan UU Nomor 5 tahun 2000. Setelah gagal dalam memberlakukan kedua UU tersebut dan untuk meredam perjuangan nasionalisme Papua untuk merdeka, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang Undang 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua (UU Otsus) yang ditandatangani Presiden Indonesia ketika itu, Megawati Soekarnoputri dan mulai diberlakukan pada 21 November 2001. Dalam pasal 76 UU Otsus dinyatakan: “Pemekaran Provinsi Papua menjadi provinsi-provinsi dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia dan kemampuan ekonomi dan perkembangan di masa datang.”

Belum lama pelaksanaan UU Otsus, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Inpres Nomor 1 tahun 2003 untuk memberlakukan kembali UU nomor 45 tahun 1999 tentang pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong. Pemekaran terus berlanjut, hingga saat ini di Papua sudah terdapat 36 kabupaten/ kota, tiga kali lipat jumlah kabupaten/kota sebelum reformasi. Proses pemekaran yang massif tersebut tentu melanggar pasal 76 UU Otsus dan menyingkirkan peranan MRP dan DPRP.

Proses Otsus dan pemekaran Papua mencita-citakan otonomi lebih besar bagi komunitas-komunitas Papua dan institusi-institusinya. Gagasan lainnya dari pemekaran Papua adalah gagasan Freddy Numberi dan JRG. Djopari yang dituangkan dalam Pokok-pokok Pikiran tentang Pemekaran Provinsi Papua. Gagasan itu bertujuan memudahkan dan memperpendek rentang kendali pemerintahan, melaksanakan pemba-ngunan, meningkatkan pelayanan dan pembinaan kemasyarakatan dan yang terutama adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat (Hommer, 2003: 18). Tak kalah penting dari hal tersebut adalah Otsus dan pemekaran yang menawarkan bagian yang lebih besar dari

pendapatan yang diperoleh dari proyek-proyek penyerapan sumber daya di Papua, termasuk 70% dari industri minyak dan gas dan 80% dari usaha-usaha pertambangan. Selain itu, Otsus juga melibatkan dana-dana khusus yang dapat menguntungkan komunitas-komunitas pedesaan untuk jangka waktu 20 tahun (Sumule, 2003; Timmer, 2007: 605). Namun, otsus dan pemekaran yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk Papua pasca reformasi sangat kental nuansa membelokkan tujuan gerakan-gerakan pembebasan Papua merdeka. Dengan demikian, otsus adalah momen transisi dari pemerintah Indonesia yang mengalami krisis dan otoritasnya sangat lemah. Namun, berbagai tekanan dari gerakan pembebasan Papua Merdeka telah membuat pemerintah Indonesia merasa perlu menancapkan kembali otoritasnya melalui otsus dan pemekaran daerah. Maka konsesi-konsesipun dilakukan agar Papua tetap menjadi bagian dari keutuhan negara Indonesia (Widjojo dkk, 2009).

Perspektif lain adalah dari studi Timmer (2007) yang menunjukkan bagaimana pemekaran sebagai proses “pemecahan kekuasaan” akhirnya mengarah kepada kontestasi para pejabat-pejabat lokal untuk mengakui tuntutan-tuntutan lokal untuk menjadi tuan di atas tanahnya sendiri. Di samping itu peringai elite politik yang haus kekuasaan semakin menjadi-jadi. Bayangan dari otsus dan pemekaran daerah adalah melahirkan posisi-posisi baru untuk pegawai negeri, peluncuran anggaran dan proyek semakin menguatkan keinginan dari pejabat lokal untuk mendukung pemekaran. Akhirnya yang terjadi adalah arena pertarungan untuk memperebutkan arena kekuasaan di kalangan pemerintahan (birokrasi) dan sudah tentunya sumberdaya alam yang melibatkan identitas-identitas lokal di tanah Papua.

Sisi lain dari Otsus dan pemekaran menjadikan semakin tumbuh suburnya nasionalisme rakyat Papua. Sisi laten dari nasionalisme Papua adalah pengalaman orang Papua di bawah pemerintah Indonesia— seperti banjir pendatang, marginalisasi ekonomi, dan

tindakan brutal oknum militer dan politik kepada rakyat Papua—semakin hadir di depan mata melalui kebijakan Otsus dan pemekaran. (Chauvel, 2008; Laksono, 2009)

Kota Manokwari sebagai ibukota Provinsi Papua Barat dari daerah perbukitan Gunung Salju Amban (foto: I Ngurah Suryawan).

Papua Barat menunjukkan pergerakan yang massif sebuah ibukota provinsi yang sedang menggeliat. Beragam infrastruktur pemerintahan dan ekonomi terus menerus hadir tanpa henti. Turun dari kampus Universitas Negeri Papua (UNIPA) di kawasan perbukitan Gunung Salju Amban, di perempatan Makalo sudah terpasang sebuah papan kecil yang menunjukkan identitas Kota Manokwari sebagai Kota Injil. Papan kecil itu bertuliskan, “Manokwari Kota Injil, di atas Tanah ini nama Yesus Dtinggikan”. Sebelum menuju salah satu pusat keramaian kota Manokwari di Sanggeng, pusat perbelanjaan Hady dan Swiss-Bell Hotel berdiri megah. Penetrasi investasi modal berlangsung kencang di Manokwari. Diantaranya yang terbesar adalah investasi Grup Hady dengan Hady Mall dan Hotel Swiss-Bell (Grup Choice yang memegang Hotel Mariot). Fulicia Manokwari membangun Hotel Meridien di Kawasan Sowi Gunung dan menjadi sebuah hotel bintang 4 pertama di Manokwari. Belum lagi ratusan pedagang-pedagang dari Sulawesi, Jawa dan daerah lain di Indonesia yang mengadu peruntungan di Manokwari, Papua Barat. Maka tidaklah heran jika pasar-pasar tradisional dan pusat-pusat keramaian di Papua Barat, di Kota Manokwari khususnya akan banyak ditemui pedagang-pedagang yang berasal dari Sulawesi dan Jawa. Bahkan karyawan-karyawan toko-toko, kasir di

supermarket hingga buruh angkut di pasar sangat jarang ditemui orang asli Papua.

Kota Manokwari juga menjadi sentral dari proses modernisasi dan perubahan sosial di provinsi yang baru terbentuk tahun 2003 ini. Kondisi inilah yang akan menghasilkan isu perubahan sosial yang kompleks, potensial untuk memberi pelajaran bagi pemahaman yang komprehensif tentang proses transformasi sosial budaya di Papua. Dewasa ini Pembangunan gedung- gedung kantor pemerintahan, toko-toko, hotel-hotel berbintang berlangsung tanpa henti. Manokwari menjadi pusat pertumbuhan ekonomi, sosial politik dan kebudayaan selain tentunya Kota Sorong. Arus pendatang menuju Manokwari seolah tidak terbendung. Berbagai macam peluang usaha di sektor ekonomi dan posisi-posisi birokrasi pemerintahan menjadi daya tarik. Jalur investasi juga terbuka melalui pembukaan perkebunan kelapa sawit, pendirian supermarket, dan pendirian hotel-hotel mewah. Seiring dengan laju pembangunan dan modernisasi di Kota Manokwari— terutama sejak reformasi dan menjadi ibukota propinsi—beragam persoalan timbul. Persoalan kemiskinan rakyat di pegunungan masih menjadi hal yang sangat serius, program akses pendidikan juga sangat memprihatinkan. Pelayanan kesehatan kepada rakyat jauh dari kesan baik dan masalah HIV/AIDS yang terus menggerogoti kehidupan rakyat. Di tingkat pemerintahan, masalah korupsi dan perebutan kekuasaan antara kelompok-kelompok suku terus terjadi.

Pengalaman saya menaiki angkutan kota—di Manokwari atau di Papua pada umumnya disebut Taxi—menunjukkan gambaran yang semakin detail. Menaiki kode taxi 3 jurusan Amban-Sanggeng, taxi yang saya tumpangi—biasanya dari mobil *carry*—sungguh istimewa. Saat saya memasuki mobil, saya sudah disapa oleh dentuman musik *reggae* Bob Marley. Di pintu bagian dalam mobil, terpasang poster Che Guevara merah. Si sopir tampak kewalahan melayani penumpang hingga berdesak-desakan di mobilnya. Si sopir bukan orang asli Papua. Dia adalah orang Ambon yang sudah 5 tahun merantau di

Manokwari. Sebelum menjadi sopir taxi, dia sempat bekerja menjadi tukang ojek dan pegawai di perusahaan ikan.

Manokwari kini tengah berkembang untuk mengaktifkan dirinya demi membangun hubungan dengan daerah lainnya. Salah satu persoalan terbesar yang selalu dihadapi di Tanah Papua; jarak dan transportasi. Daerah-daerah pedalaman sangat sulit dijangkau karena jarak yang jauh dan transportasi yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itulah pada tahun 2009 dibuka jalan darat antara Manokwari dan Sorong sejauh 600 km atau sama dengan jalan Semarang-Jakarta. Dengan dana Otsus 2009 untuk Papua Barat sebesar Rp. 1,118 triliun ditambah dengan dana alokasi khusus Rp. 600 milyar khusus untuk infrastruktur, seharusnya pelayanan pembangunan kepada masyarakat tidak diragukan lagi (*Kompas*, 23 Februari 2010). Namun tidak demikian yang terjadi di lapangan. Sektor-sektor ekonomi informal di Kota Manokwari dikuasai sebagian besar oleh pendatang yang sebagian besar berasal dari Sulawesi, Jawa, Maluku dan sebagian daerah lain. Ini belum termasuk pemasukan penduduk pendatang ke daerah-daerah transmigrasi yang tersebar di daerah-daerah pinggiran Kota Manokwari seperti wilayah Prafi, Waseki, dan Ransiki. Selain pertanian, perkebunan kelapa sawit menjadi tujuan para pendatang ke Papua. Jika demikian, lalu bagaimana nasib warga asli Papua?

Mama-mama pedagang asli Papua masih menggelar dagangan hasil buminya beralas karung. Di Pasar Wosi, situasi itu kentara sekali terjadi. Para pedagang pendatang yang kebanyakan berasal dari Sulawesi dan Jawa mendapatkan lapak-lapak kios semi permanen. Mereka biasanya bejualan sandang, VCD/DVD dan kebutuhan lainnya. Jika yang memiliki modal lebih besar, mereka dapat menyewa kios yang lebih permanen di pinggiran pasar. Sementara mama-mama Papua hanya berjualan di belakang pasar yang didominasi para pendatang. Mereka berjualan berdesak-desakan dan hanya menggelar dagangannya di atas tanah beralas koran atau karung.

Saat saya mengunjungi Pasar Wosi, suasana sangat padat. Banyak pembeli berseliweran. Beberapa anak kecil turut menawarkan jasa angkut barang-barang dagangan dari para pembeli maupun para pedagang. Kondisi perekonomian masyarakat penduduk asli Papua sungguh terhimpit di tengah laju perkembangan Kota Manokwari. Banjir pendatang ke Manokwari terus terus berlangsung melalui kapal laut maupun melalui pesawat yang mendarat di Bandara Manokwari. Bukan hanya akses dan keberuntungan ekonomi mereka yang mulai lambat-laun terpuruk, tetapi keberlangsungan “hidup” mereka dalam tanah pun terongrong. Cengkeraman kuasa investasi global yang menerjang Papua dalam bentuk perkebunan sawit, pembangunan ruko-ruko dan mall-mall, hotel-hotel megah, perumahan, hingga masuknya pengusaha-pengusaha dan modal besar lainnya.

Saya teringat saat saya menginjakkan kaki di Kota Manokwari pada Oktober 2009, saya melihat kampus Universitas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari dipalang oleh Suku Arfak (Mandacan). Saya bingung dan mendapatkan informasi dari seorang pendatang sebut saja namanya Mulyana (34 thn), seorang tukang ojek dari Sulawesi. Saudaranya membeli tanah dari orang Mandacan ditukar dengan mobil seharga Rp. 70 juta. Setelah 3 tahun, tanah diminta kembali. Di atas tanah yang kini telah dibangun rumah permanent dipalang. “Beli tanah di Papua sulit-sulit gampang. Tanah semua milik adat. Jadi sertifikat tidak begitu penting. Dulu mungkin gampang beli tanah, tapi sekarang pikir-pikir. Takut dipalang dan cari masalah dengan orang Arfak,” ungkapnya.

Kota Manokwari, ibu kota Provinsi Papua Barat dihuni oleh suku asli Arfak. Empat suku asli Arfak tersebut adalah Suku Hatam, Moule, Sough, dan Meyakh. Fam besar dari Suku Hatam yaitu Mandacan menguasai tanah di Kota Manokwari. Suku asli Arfak lainnya mendiami wilayah sekitar Pegunungan Arfak yang terbagi dalam lima Kecamatan yaitu Anggi, Warmare, Oransbari, Ransiki, dan Minyambou. Di kawasan Pegunungan Arfak, suku Arfak mengenal batas-batas wilayah hutan untuk

dimanfaatkan oleh masing-masing suku, disebut tanah milik adat yang dalam bahasa Suku Hatam disebut dengan *Hanjop*. Mereka berdiri menjaga batas masing-masing wilayah dalam menjaga dan memanfaatkan hasil hutan (*Igya Ser Hanjop*) (Laksono dkk, 2001). Namun, pengusaan tanah ini berubah seiring dengan laju perubahan sosial di Kota Manokwari. Tanah-tanah adat kini telah banyak yang lepas. Pembangunan gedung pemerintah dan fasilitas publik lainnya, transmigrasi dan perekebunan sawit, dan sudah tentu ledakan penduduk pendatang dan modal yang merongrong tanah Papua. Tanah adat atau tanah milik yang bersifat kolektif inilah yang memantik masalah dalam jual beli, sehingga kasus-kasus pemalangan kerap terjadi. Sertifikat saja *tra* (tidak) cukup untuk “menjual” tanah di Papua, namun perlu surat pembebasan dari Dewan Adat.

Di tengah keterdesakan itu, sentimen identitas lokal kesukuan dan perebutan kekuasaan lokal menjadi pentas pertarungan para elit-elit lokal dan suku untuk menunjukkan jati dirinya. Di Manokwari seruan-seruan bupati Manokwari harus dari suku Arfak pun terus berlangsung kencang. “Demi kepentingan masyarakat Arfak, jangan ada orang yang berupaya menghalangi atau membatalkan aspirasi masyarakat suku besar Arfak itu. Perlu di catat, Bupati Manokwari kedepan harus orang asli Arfak,” pernyataan seruan dari semua elemen Suku Besar Arfak yang dimediasi Forum Peduli Suku Besar Arfak Menjadi Tuan di Negeri Sendiri dan Ikatan Mahasiswa Arfak (IMA) (*Cahaya Papua*, 12 April 2010).

Perjuangan Mama-Mama Papua

Memasuki Pasar Sanggeng Manokwari, Papua Barat pada suatu sore di bulan September 2009, saya melihat sebuah “garis pembatas” yang jelas. Banyak kesan, kisah, dan kompleksitas yang dapat saya tangkap. Pasar Sanggeng berada di pinggiran pantai, dimana pasar ikan menjadi satu di dalamnya. Memasuki ruas jalan Pasar Sanggeng dari jalan umum, saya sudah disapa dengan tawa mama-mama yang menggelar dagangan hasil buminya. Berjejer

mama-mama berdagang dengan alas plastik dan koran yang mulai basah. Beragam hasil bumi dijual hanya beralas koran atau karung; mulai berbagai jenis sayur, cabai, ubi kayu, pisang. Berbagai hasil bumi ini dijual dengan cara mengelompokkannya atau dengan diikat. Cabai yang sudah dikelompokkan dan sayur yang telah diikat dijual dengan harga Rp. 3000-Rp. 5000. Ubi kayu dan rambutan juga dijual dalam bentuk ikatan-ikatan.

Sore itu suasana pasar sangat ramai. Mama-mama Papua berjualan bergelar karung dan koran, tepat berada di depan kios-kios triplek yang disewa untuk pedagang yang sepertinya berasal bukan dari Papua. Saya melihat baru memasuki Pasar Sanggeng, di kios triplek semi permanen adalah penjual gorengan, di sebelahnya adalah penjual mie ayam dan soto ayam. Berseberangan jalan adalah pedagang- pedagang baju, VCD dan DVD bajakan yang juga didominasi oleh para pedagang pendatang. Di ujung pasar adalah pasar ikan dan terminal angkutan kota. Bersebelahan dengan Pasar Sanggeng, terdapat pasar tingkat, yang sering disebut “pasting” tiga lantai yang didominasi oleh para pedagang pendatang berjualan berbagai jenis pakaian, peralatan elektronik, VCD dan DVD bajakan dan yang lainnya. Saya juga melihat beberapa sudut pasar yang didominasi oleh tukang cukur dan penjual emas di lantai dasar Pasar Tingkat Sanggeng. Sementara saat naik ke lantai 3 pasar, saya melihat penjual batik-batik Papua banyak yang berasal dari Sulawesi dan Jawa.

Jalan menyusuri pasar Sanggeng masih berupa tanah sehingga ketika musim hujan, seperti saat saya datang, air menggenang dimana-mana. Langkah saya kemudian menuju pasar ikan. Seikat ikan berisi 4 ekor ikan kecil-kecil dijual seharga Rp. 20.000. Suasana sore itu gaduh sekali. Perahu-perahu yang bersandar tampak sibuk menurunkan banyak ember-ember ikan. Saat si nelayan bersiap menurunkan hasil tangkapannya, para pedagang yang sudah tampak menunggu lama di pinggir pantai berebut untuk mendapatkannya. Di ujung dalam pasar adalah terminal angkutan kota

yang menjadi salah satu pusat kesibukan jalur transportasi dalam Kota Manokwari. Saat saya bergegas menuju terminal, saya dihadang oleh seorang lelaki Papua. “Bos, minta uangnya.” Sontak saja saya terkejut. Saya melihat matanya sudah memerah dan jalannya sempoyongan. Saya menduganya sudah dalam keadaan mabuk.

Sepanjang ruas jalan menuju Pasar Sanggeng, ojek-okek dan angkutan kota yang disebut “taksi” tampak hilir mudik. Di depan “pasting”, tampak berjejer ojek-okek menunggu antrian. Saya perhatikan banyak dari mereka bukanlah orang asli Papua. Ojek yang saya tumpangi menuju kos berasal dari Sulawesi Toraja. Sebut saja namanya Azhar (32). Ia mengaku baru 3 tahun merantau ke Manokwari mengikuti saudaranya. Sebelum menjadi tukang ojek, Azhar sempat menjadi pegawai di sebuah perusahaan rokok hanya dengan gaji Rp. 600 ribu. “Mana cukup uang itu di Manokwari mas. Kalau di Jawa 5 ribu sudah dapat nasi ayam, di sini (Manokwari), bakso pun mungkin sekarang tidak dapat,” ungkapnya. Kehadiran para pendatang yang merangsek masuk ke pasar tradisional menghadirkan persaingan yang tidak seimbang bagi mama-mama Papua. Pasar tradisional yang menjadi ruang bagi mama-mama Papua untuk berjuang menghidupi anggota keluarganya dan membantu perekonomian rumah tangga. Kini pasar telah menjadi tempat persaingan yang berat untuk mereka.

Pada 20 Desember 2010, saat pemerintahan Gubernur Barnabas Suebu telah meresmikan pasar khusus yang diperuntukan bagi mama-mama Pedagang asli Papua. Pasar ini terletak di tengah-tengah Kota Jayapura. Tepatnya, berada di halaman kantor Kepegawaian Daerah Provinsi Papua yang merupakan eks kantor Badan Informasi dan Komunikasi Daerah (Bikda) di Jalan Percetakan. Pasar tersebut adalah tempat berjualan mama-mama Papua yang sebelumnya berjualan di di depan supermarket Gelael, Bank Papua, wilayah Matahari, jalan Irian dan Pasar Ampera. Sebab di dalam areal pasar ini telah dibangun puluhan tempat jualan

beratap seng bagi para pedagang yang awalnya tidak mendapat tempat di dalam pasar yang memiliki tenda berukuran raksasa ini. Hanya saja, belum semua mama-mama pedagang Papua telah terakomodir di dalam pasar ini. Saat pasar ini diresmikan 20 Desember 2010 oleh Gubernur Barnabas Suebu, Pemda Papua lewat Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi (Disperindakop) telah memberikan bantuan dana stimulus sebesar Rp. 600 juta guna pengembangan usaha mama-mama Pedagang Papua dan sebuah truck berbentuk mini bus. Kini, sekitar Rp. 300 juta dana itu telah dikelola oleh Koperasi Mama-mama Pedagang asli Papua (KOMMPAP) dalam bentuk kredit kepada mama-mama dengan bunga sebesar 2,5 persen. SOLPAP (Solidaritas Pedagang Asli Papua) dan KOMMPAP sedikit kecewa karena pembangunan Pasar Sementara Bagi Mama-mama Papua ini tidak berada pada lokasi yang strategis sehingga kurang mendapat perhatian pembeli. Kini salah satu masalah utama yang sedang dihadapi Mama-mama Pedagang Papua di dalam pasar adalah minimnya pembeli sehingga mereka terus mengeluh kerugian.

Mama Yuliana Gobay misalnya, perempuan asal Paniai yang telah lama berjualan di depan supermarket Gelael ini sempat mengaku kalau sejak berjualan di pasar sementara, dia dan sebagian mama-mama Papua yang lain masih mengalami kerugian. Meskipun dirinya senang karena saat ini bisa menerima bantuan dana kredit dari Kommpap. Tapi dia sedikit pesimis bahwa dana stimulus ini bisa membantu mendorong kemajuan usahanya.³ Di tengah situasi yang mendesak itu, mama-mama Papua pun bersiasat untuk memperjuangkan penghidupannya. SOLPAP dan KOMMPAP menjadi wadah mereka berorganisasi dan bersolidaritas.

Sebuah catatan blog dari KOMMPAP menggambarkan usaha mama-mama ini mengorganisir diri dan memperkuat diri dalam organisasi adalah sebagai berikut:

³Keseluruhan bagian ini dikutip utuh dari artikel Julian Howay, "Meneropong Pasar Mama-Mama Papua" (artikel tidak diterbitkan).

Koordinator SOLPAP dan mama-mama Papua dalam aksi menuntut pasar yang layak bagi mama-mama Papua (foto: Dokumentasi SOLPAP).

Bank Papua merupakan mitra kerja KOMMPAP, selama 3 minggu penyaluran kredit untuk mama – mama, KOMMPAP berpikir bagaimana setiap harinya mama – mama menyimpan sedikit dari kelebihan hasil keuntungan penjualan. TabunganKu adalah produk Tabungan yang tepat untuk pelajar, mahasiswa, pedagang sayuran, ikan, dan bahan makanan. Mama – mama hanya cukup dengan setoran awal Rp.20.000 dan melengkapi formulir aplikasi yang akan dibantu oleh petugas, membawa foto copy tanda pengenal yang masih berlaku, misalkan KTP. Fasilitas yang didapatkan mama – mama adalah mendapatkan buku tabungan dan kartu ATM, apabila mama – mama menghendaki untuk menggunakan kartu ATM.

Dalam tabunganKu, mama – mama tidak dikenakan biaya administrasi. Jika mama – mama rajin menabung. Kalau sampai 6 (enam) bulan mama – mama tidak menabung, akan dikenakan biaya administrasi bank. Setoran tabungan selanjutnya, minimal Rp. 10.000. Pada saat mama – mama ingin mengambil uang yang sudah ditabung, saldo terendah yang harus ada ditabungan, minimal Rp. 20.000. Jika dalam seminggu, mama – mama rajin menabung dalam waktu 5 (lima hari), minimal dalam sebulan tabungan mama - mama adalah Rp.250.000. TabunganKu adalah awal yang baik bagi mama – mama pedagang asli Papua. Terutama kesulitan yang mereka hadapi, selama hampir 10 tahun berjualan, mereka tidak mempunyai tabungan ini khusus bagi kelompok mama – mama yang menjual sayuran, hasil kebun dan anyaman.

Ada sebagian mama – mama yang sudah mempunyai tabungan, namun mereka mengeluh karena hanya menabung Rp.100.000, setiap minggu, harus mengantri dengan waktu 1(satu) jam dan berada dengan nasabah yang mengambil uang dan menyimpan uang dalam jumlah yang besar. Ada rasa malu atau minder ke Bank karena hanya mempunyai uang yang kecil untuk ditabung. Dengan adanya petugas yang turun di Pasar untuk melayani setoran dan penarikan tunai dari pukul

17.00 – 20.00, ini memudahkan mama – mama untuk tidak lagi mengantri di Bank dan memiliki rasa nyaman karena proses ini terjadi di Pasar mereka sendiri. Kommpap juga berpikir, jika mama – mama sudah mempunyai tabungan dan nomor rekening di Bank Papua, bantuan kredit bisa disalurkan melalui nomor rekening mama – mama sendiri.⁴ KOMMPAP juga melakukan gebrakan dengan memberikan bantuan kredit kepada mama-mama Papua.

Catatan dari blog KOMMPAP menggambarkan bagaimana usaha mama-mama Papua bersama relawan dari KOMMPAP dan SOLPAP untuk memperkuat modal dari para mama- mama pedagang di pasar tradisional. KOMMPAP sebenarnya adalah salah satu perjuangan rakyat Papua untuk mengubah kebijakan pemerintah untuk memperhatikan tenaga produktif orang asli Papua. Membangun kemandirian ekonomi bagi rakyat Papua adalah tugas mendesak yang harus dilakukan saat ini. Para mama yang sudah lama berjualan di Kota Jayapura, terhimpit dengan ekonomi keluarga yang meningkat. Sampai saat ini para mama berhadapan dengan tengkulak atau reintenir yang memanfaatkan keuntungan dengan modal peminjaman yang skala Rp. 500.000 – 1.000.000 dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi dalam sebulan. Misal, mama – mama pinjam Rp.500.000, ia tidak mendapatkan pinjamannya secara utuh, tetapi dipotong administrasi, jadi ia hanya menerima Rp. 400.000. Dalam jangka waktu satu bulan mama – mama harus mengembalikan setoran pinjaman sejumlah Rp. 600.000. Artinya bunga pinjaman tersebut adalah 20% dalam sebulan. Setoran perhari yang dikenakan Rp. 20.000. Hal ini adalah contoh penjajahan ekonomi yang dihadapi oleh mama – mama pedagang asli Papua. Mama menguntungkan oknum yang menguras hingga Rp.300.000/bulan.

KOMMPAP memberikan penawaran bunga yang rendah bagi mama – mama pedagang asli Papua. Bunga yang diberikan adalah 1,5 % per bulan dengan pengembalian waktu 6 bulan. Misalkan ; mama meminjam uang sebesar Rp. 3.000.000, bunga pinjaman sebesar Rp.

270.000 selama 6 bulan. Kesediaan dari mama – mama ingin setoran per hari,per minggu,dan perbulan. Kommpap mencairkan dana kredit dengan total Rp. 400.000.000 Juta terlebih dahulu. Sampai 16 Juni 2011, sudah 186 mama – mama pedagang asli Papua yang berada dalam Pasar Sementara dilayani dengan modal Rp. 296.000.000 juta yang sudah diberikan sebagai modal pinjaman. Dengan bantuan ini, Mama - mama Pitersina Jitmau, bisa membeli mesin parut kelapa untuk menghidupi ekonomi keluarga dan Mama Esterfinah Antoh bisa membeli 1 drum minyak kelapa agar perputaran modal ekonomi bisa berjalan. kedua mama - mama ini salah satu contoh bahwa mama - mama pedagang asli Papua ingin maju sama seperti pedagang non Papua, kendala mereka adalah tidak ada bantuan modal selama ini dari pemerintah.

Dana kredit diberikan berdasarkan golongan penjualan. Pinjaman awal pinjaman maksimum Rp. 5.000.000. Batas pinjaman Rp. 3.000.000. untuk kelompok Ikan Asar. Kelompok Sayuran, buah – buahan, dan campuran diberikan modal maksimum Rp. 2.000.000. Kelompok Pinang dan Sagu mentah diberikan modal Rp. 1.000.000 dan kelompok yang menjual hasil kebun diberikan pinjaman Rp. 500.000. KOMMPAP memprioritaskan mama – mama yang berjualan di pasar sementara dan kemudian akan melayani mama – mama yang berjualan di Jalan Irian, di depan Bank Papua, dan Jl. Percetakan.⁵

Kemandirian dalam Transformasi Sosial Budaya yang Pelik

Kisah etnografi mama-mama Papua dalam perjuangan penghidupannya menggambarkan bagaimana usaha untuk menumbuhkan kemandirian menjadi hal yang pelik sekaligus sulit di Tanah Papua. Kemandirian sebuah masyarakat paling tidak bersumberkan kepada dua hal penting.*Pertama* sudah tentu

⁴Keseluruhan bagian ini dikutip secara utuh dari <http://kommpap.blogspot.com/2011/06/mama-mama-di-pasar-sementara-mulai.html> (diakses 12 Mei 2015).

⁵Keseluruhan bagian ini dikutip secara utuh dari “Tawaran Bunga Kredit Rendah untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua” dalam <http://kommpap.blogspot.com/2011/06/tawaran-bunga-kredit-rendah-untuk-mama.html> (Diakses 12 Mei 2015).

terciptanya integrasi sosial yang di tengah masyarakat yang akan menciptakan solidaritas sosial dan masyarakat yang terorganisir. Integrasi sosial dalam masyarakat bersumber dari jaringan sosial yang terbina dan berlandaskan nilai-nilai sosial budaya yang direproduksi melalui praktik berkebudayaan sebuah komunitas.

Salah satu poster tuntutan mama-mama Papua untuk pasar yang layak (foto:Dokumentasi SOLPAP)

Praktik kebudayaan yang dimaksudkan adalah keseluruhan aktivitas berkomunitas dalam pembentukan nilai-nilai sosial dan norma-norma yang menjadi sendi-sendi berjalannya komunitas tersebut. Di dalam aspek sosial budaya ini terjalin juga bidang-bidang lain yang terhubung seperti pendidikan mengekspresikan nilai-nilai sosial budaya sebuah masyarakat. Begitu juga hubungannya dengan sistem politik dan mekanisme kekuasaan dan pengendalian sosial dalam menciptakan keharmonisan hubungan dalam masyarakat.

Kemandirian *kedua* adalah terciptanya sumber-sumber ekonomi sebagai basis

pemenuhan kebutuhan primer manusia. Sumber ekonomi sangat penting untuk memastikan bahwa sebuah komunitas dapat hidup dan bertahan. Sumber ekonomi itu mungkin terdapat di sekitar lingkungan komunitas tersebut tinggal ataupun berasal dari luar. Perpaduan sendi-sendi sosial budaya dan ekonomi itulah yang akan merekatkan integrasi sosial di tengah masyarakat dan membentuk masyarakat yang solid dan terorganisir. Namun yang sesungguhnya terjadi hampir di seluruh komunitas di Indonesia adalah sebuah bentuk interkoneksi global; yang menghubungkan komunitas-komunitas terpencil dengan kuasa investasi global. Dalam konteks Papua—dan saya kira persoalan umumnya—adalah ancaman integrasi sosial dan solidaritas sosial adalah pertautan komunitas lokal dengan aspek-aspek nilai global yang membuat terjadinya ketegangan antara nilai-nilai lama dan nilai-nilai baru. Namun, meski pertautan lokal dan dunia global yang tak terhindarkan itu, hal-hal apa sajakah yang patut diperhatikan bagi komunitas lokal agar kemandirian dan martabatnya sebagai sebuah komunitas yang solid tidak tergandaikan?

Fenomena menonjol di Tanah Papua ketika interkoneksi lokal dan global itu telah menimbulkan sebuah fragmentasi (keterpecahan) di tengah masyarakat. Hal ini salah satunya diakibatkan oleh digugatnya nilai-nilai lama yang sebelumnya menjadi pondasi integrasi dan solidaritas sosial dengan nilai-nilai baru yang hadir akibat pengaruh global dan modernitas. Pegangan komunitas pun menjadi luntur ketika anggota masyarakatnya mulai terpengaruh dan mempraktikkan nilai-nilai baru yang acap kali berbenturan dan tidak sesuai dengan nilai-nilai lama. Keberagaman etnik dan budaya yang tinggi di Papua juga sangat mempengaruhi bagaimana kompleksitas dan respon masyarakat dan nilai-nilai lama terhadap hal-hal baru yang hadir diintroduksi oleh pemerintah, agama, dan sudah tentu kuasa investasi global dalam bentuk investasi dan perusahaan-perusahaan yang tumbuh subur di setiap jengkal Tanah Papua.

Praktik untuk menyemaikan kemandirian yang pertama dan utama adalah pemahaman dan komitmen bahwa heterogenitas budaya adalah modal dan kekayaan yang sangat luar biasa di Tanah Papua. Oleh karena itulah diperlukan usaha-usaha spesifik dan terfokus dari berbagai lapisan kepentingan untuk menyuburkan diversitas budaya Papua ini, bukan malah menyederhanakan, atau bahkan mengekang ekspresinya. Hal-hal inilah yang sebelumnya dilakukan oleh rezim otoritarian Orde Baru Indonesia dalam membuat kebijakan terhadap praktik kebudayaan di Papua. Kebudayaan adalah basis dasar menuju kemandirian dan martabat sebuah komunitas dan bangsa. Namun, alih-alih berkomitmen dan mengembangkan ekspresi keberagaman budaya, fenomena di Tanah Papua kini menggambarkan bagaimana argumentasi diversitas budaya dirampok oleh elit lokal untuk mempolitikasi masyarakat dalam menuntut pemekaran daerah. Pemekaran daerah menghasilkan masyarakat yang elitis karena termanipulasi oleh para elit yang mengambil alih cita-cita integrasi sosial dan masyarakat yang terorganisir. Padahal, integrasi sosial dan masyarakat yang terorganisir adalah modal sosial budaya yang ampuh untuk mewujudkan kemandirian di Papua.

Candu lain yang menggerogoti kemandirian rakyat Papua adalah praktik pragmatis melalui uang yang terjadi hampir di sebagian besar kegiatan-kegiatan sosial politik, budaya dan kemasyarakatan. Terkhusus dalam wacana pemekaran daerah, para elit memanipulasi uang ini sehingga pemekaran hanya melayani kepentingan elit, bukan kehidupan sosial kultural masyarakatnya. Para elit sama sekali tidak berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang terorganisir tapi justru menimbulkan fragmentasi di tengah masyarakat. Oleh karena itulah dalam rangka mewujudkan kemandirian di Papua, sangat diperlukan usaha-usaha kreatif dari masyarakat bersama dengan pemerintah daerah dan kelompok-kelompok masyarakat sipil lainnya untuk melakukan gerakan untuk mengapresiasi dan menggali nilai-nilai sosial budaya dan seni. Nilai-nilai ini nantinya akan menginspirasi

praktik-praktik kemandirian sosial budaya dan politik merekognisi nilai-nilai sosial budaya dan seni yang menghidupi masyarakat setempat. Dengan demikian pondasi sikap-sikap kemandirian ini akan mengakar kuat dalam kehidupan social budaya masyarakat, tidak elitis dan tercerabut dari akarnya.

Menumbuhkan kemandirian di Papua juga sepatutnya memberikan perhatian kepada praktik dan gerakan sosial untuk memediasi pendidikan adat dan bahasa ibu sebagai medium penguatan identitas budaya dan martabat rakyat Papua. Selama ini introduksi pembangunan dan nilai-nilai modernitas alpa untuk merekognisi hal ini. Yang terjadi dalam program pembangunan justru hanya memfokuskan kepada pelayanan administratif dalam bentuk pembangunan fisik gedung-gedung pemerintahan, perebutan jabatan dan pegawai di birokrasi pemerintahan, dan ujung-ujungnya adalah pembagian uang untuk mewujudkan menjalankan pelayanan pemerintahan.

Kemandirian rakyat Papua berawal dari kedekatan dan komitmennya terhadap akar budayanya. Jika diakui secara jujur, pendidikan adatlah yang melatih orang Papua untuk membina hidup dan sekaligus juga membina moral sebagai sebagai seorang manusia. Namun yang terjadi adalah isi dari pendidikan adat ini yang bertujuan untuk membentuk manusia yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dalam adat dan norma diambil oleh negara dengan pendirian gedung-gedung sekolah yang kehilangan muatan paling mendasar dari pendidikan; membentuk manusia yang apresiatif terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Yang justru terbentuk adalah manusia yang pragmatis untuk mencerdaskan dirinya sendiri tanpa mempunyai sikap apresiatif terhadap nilai-nilai, norma, dan moral kemanusiaan. Menumbuhkan iklim kemandirian di Tanah Papua harus dimulai dengan pendidikan. Namun selama ini pendidikan di Papua seperti kehilangan spirit apresiasi nilai-nilai moral dan norma yang dari hilangnya perhatian untuk pendidikan bahasa

ibu bagi generasi muda selanjutnya. Apresiasi terhadap bahasa ibu menunjukkan orang yang mempunyai integritas, akar identitas, dan dengan demikian mempunyai harkat dan bermartabat.

Kemandirian di Papua terancam oleh logika administratif dan uang yang akan menunggu waktu saja untuk melahirkan orang-orang Papua yang tidak mempunyai kemandirian dan inisiatif untuk melakukan perubahan social. Kondisi masyarakat yang frustrasi dan lumpuh tersebut tersebut akan sangat mudah melakukan tindak kekerasan. Masyarakat Papua yang hanya tergantung pada uang, proyek-proyek bantuan, dan menjual kemiskinan telah kehilangan martabatnya. Di sisi lain, sumber daya alam yang kaya di Tanah Papua juga jauh sebelumnya telah tereksplorasi. Dan kini, martabat sebagai manusia juga terjual ketika sangat tergantung kepada bantuan atau melakukan berbagai cara untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Menumbukan kemandirian di Papua adalah langkah mendesak yang harus menjadi perhatian setiap warga masyarakat atau siapapun yang berkomitmen untuk menciptakan masyarakat Papua yang bermartabat.

Simpulan

Etnografi mama-mama Papua dalam memperjuangkan kemandirian hidupnya secara gamblang menggambarkan bagaimana potret inspirasi di tengah transformasi sosial budaya yang pelik di Tanah Papua. Mama-mama Papua mengorganisir diri dalam upaya memperjuangkan haknya mendapatkan pasar yang layak melalui SOLPAP. Para mama ini kemudian menghimpun diri dalam KOMMPAP untuk memperkuat permodalan mereka dalam berjualan di pasar. Di tengah situasi keterpecahan akibat pemekaran daerah dan ketergantungan terhadap berbagai macam bantuan yang diintroduksi pemerintah melalui berbagai program, inspirasi untuk menumbuhkan sikap kemandirian dan berubah ke hidup yang lebih baik menjadi sangat penting. Hanya dengan kemandirian yang dicontohkan oleh mama-mama Papua,

transformasi sosial budaya akan berjalan di Tanah Papua dengan menempatkan orang Papua sebagai subyeknya. Memang betul kata salah seorang mama Papua yang menyebutkan bahwa tidak ada gunanya bagi dirinya kini meratap di tengah kondisi yang “melumpuhkan” mereka di Tanah Papua, tanah mereka sendiri. Ia mengungkapkan betapa ia berjuang menghidupi keluarganya, dengan cara berjualan hasil bumi yang ia dapatkan di kebun-kebunnya sendiri. Perjuangan telah menjadi bagian dari kehidupan mama-mama Papua.

Daftar Pustaka

- Giay, Benny, 2000. *Menuju Papua Baru: Beberapa Pokok Pikiran sekitar Emansipasi Orang Papua*. Jayapura: Deiyai/Els-ham Papua.
- Laksono, P.M. 2009. “*Peta Jalan Antropologi Indonesia Abad Kedua Puluh Satu: Memahami Invisibilitas (Budaya) di Era Globalisasi Kapital*”. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 27 Oktober 2009.
- Laksono, P.M. 2010. “*Kontekstualisasi (Pendidikan) Antropologi Indonesia*”. Makalah dalam Sarasehan AJASI (Asosiasi Jurusan Antropologi Seluruh Indonesia) di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Laksono, P.M. 2010b. “*Mewacanakan Pemberdayaan Masyarakat dalam Antropologi*”. Makalah dalam Kongres Asosiasi Antropologi Indonesia ke-3 dan Seminar Antropologi Terapan di Cisarua 21-23 Juli 2010.
- Laksono, P.M. 2011. “*Ilmu-ilmu Humaniora, Globalisasi, dan Representasi Identitas*”. Pidato yang disampaikan pada Peringatan Dies Natalis ke-65 Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 3 Maret 2011.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1987. “*Etnografi sebagai Kritik Budaya: Mungkinkah di Indonesia?*” dalam Majalah Jerat Budaya No 1/1/1987 Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa. 1987. “*Etnografi sebagai Kritik Budaya: Mungkinkah di Indonesia?*” dalam Majalah Jerat Budaya

No 1/I/1987 Jurusan Antropologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

- Suryawan, I Ngurah. 2013. *"Tanah Dibutuhkan Tapi Orang Tidak: Transformasi Masyarakat Adat dalam Perspektif Etnografi dan Sejarah Sosial"* dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 2 Juli – Desember 2013.
- Suryawan, I Ngurah. 2012. *"Politik Ruang (Pasar) dan Pemekaran Daerah: Siasat Rakyat Papua di Garis Depan Global"* dalam *Kritis, Jurnal Studi Pembangunan Interdisipliner* Vol. XXII No. 1 Februari – Juli 2012.
- Suryawan, I Ngurah. 2012b. *Jiwa Yang Patah*. Yogyakarta: Pusat Studi Bahasa dan Budaya Papua (Pusbadaya) UNIPA Manokwari, Papua Barat dan Penerbit Kepel.
- Suryawan, I Ngurah. 2011. *"Antropologi Gerakan Sosial: Membaca Transformasi Identitas Budaya di Kota Manokwari, Papua Barat"* dalam *Humaniora, Jurnal Budaya, Sastra, dan Bahasa* Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Volume 23, Nomor 3, Oktober 2011 (290-300)
- Suryawan, I Ngurah. 2011b. *"Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua"* dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JSP)* Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153).
- Tebay, Neles. 2009. *Dialog Jakarta-Papua Sebuah Perspektif Papua*. Jakarta: SKP Jayapura.
- Timmer, Jaap, 2007, "Desentralisasi Salah Kaprah dan Politik Elit di Papua", dalam Henk Schulte Nordhold dan Gerry van Klinken (eds.), *Politik Lokal di Indonesia*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 595-625
- Timmer, Jaap. 2013. "Menentang Kulturalisme di Tanah Papua" dalam I Ngurah Suryawan, *Jiwa yang Patah*. Yogyakarta: Kepel Press dan Pusat Bahasa dan Budaya Papua UNIPA Manokwari.
- Tsing, Anna. Lowenhaupt. 1998. *Di Bawah Bayang-Bayang Ratu Intan: Proses Marjinalisasi pada Masyarakat Terasing*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Tsing, Anna. Lowenhaupt. 2005. *Friction: An Ethnography of Global Connection*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Widjojo dkk, Muridan. 2009. *Papua Road Map: Negotiating the Past, Improving the Past and*

Securing the Future. Jakarta: Buku Obor, LIPI dan TIFA.

Internet

- "Untuk Mama Papua, Bukan Pasar Biasa dalam <http://pauawoman.blogspot.com/2010/04/untuk-ma-ma-papua-bukan-pasar-biasa.html>. (Diakses 20 Oktober 2010).
- "Tawaran Bunga Kredit Rendah untuk Mama-Mama Pedagang Asli Papua" dalam <http://kommpap.blogspot.com/2011/06/tawaran-bunga-kredit-rendah-untuk-mama.html> (Diakses 12 Mei 2015).
- "Mama-Mama di Pasar Sementara Mulai Menabung" dalam <http://kommpap.blogspot.com/2011/06/mama-ma-ma-di-pasar-sementara-mulai.html> (diakses 12 Mei 2015).
- "Mama-mama Papua demo ke DPRD" dalam <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=14&jd=Mama-mama+Papua+Demo+ke+DPRD&dn=20100330221832>. Diakses 22 Oktober 2010.